

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

##### **4.1.1 Kebijakan Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) Di Kabupaten Kendal**

Penerapan Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di Kabupaten Kendal menjadi model ketepatan dan efektivitas penyaluran bansos. Penekanan program pada prosedur verifikasi dan validasi yang komprehensif, ditambah dengan penggunaan analisis data melalui sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, memastikan pendekatan yang tepat sasaran dalam pemilihan penerima manfaat. Dengan menjawab kebutuhan individu dengan keadaan khusus dan mendorong inklusivitas melalui proposal dari desa-desa yang kurang terlayani, program ini menunjukkan komitmen untuk menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Penyelenggaraan Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Boja memiliki kesamaan penekanan pada prosedur verifikasi dan validasi yang komprehensif untuk menjamin keakuratan penyaluran bantuan sosial. Kedua wilayah tersebut memanfaatkan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk analisis data dan referensi silang guna mengotentikasi informasi yang diberikan oleh calon penerima, dengan tujuan menentukan target penerima manfaat secara akurat. Selain itu, kedua implementasi tersebut melibatkan pendekatan strategis untuk mencalonkan

calon penerima, dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik, penyakit kronis, dan tingkat produktivitas. Desa-desa yang tidak memiliki akses terhadap bantuan sosial diwajibkan untuk mengajukan proposal, sehingga menambah dimensi berbasis masyarakat dalam pemilihan calon. Metodologi yang terorganisir dengan baik dan fleksibel yang digunakan dalam pelaksanaannya memastikan distribusi bantuan yang efisien dan menunjukkan dedikasi program terhadap transparansi, akuntabilitas, dan menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Dari tahap-tahap implelementasi dapat disimpulkan:

- 1) Verifikasi dan Validasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera

Penerapan Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di Kabupaten Kendal menekankan pada prosedur verifikasi dan validasi yang ketat untuk menjamin keakuratan penentuan sasaran penerima manfaat. Proses ini melibatkan referensi silang data, kemungkinan besar menggunakan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, untuk mengautentikasi informasi yang diberikan oleh calon penerima. Verifikasi yang berhasil sangat penting agar program dapat berfungsi secara efektif. Proses verifikasi dapat mencakup verifikasi fisik nama-nama pada daftar penerima sementara dengan orang/rumah tangga yang sebenarnya, mengumpulkan informasi demografis, dan menggunakan dokumentasi objektif seperti akta kelahiran atau kartu identitas yang dikeluarkan pemerintah untuk memverifikasi kriteria

kelayakan. Dalam konteks KJTS, proses verifikasi dirancang untuk memastikan bahwa penerima tidak menerima bantuan lain dari pemerintah, dan hal ini dicapai melalui referensi silang dan otentikasi secara menyeluruh terhadap informasi yang diberikan oleh calon penerima manfaat..

2) Pengusulan Calon Penerima Bantuan Kartu Jawa Tengah Sejahtera

Program di Kabupaten Kendal ini menggunakan pendekatan strategis dalam pengusulan calon penerima bantuan Kartu Jateng Sejahtera. Hal ini kemungkinan besar melibatkan analisis data yang beragam, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan khusus, penyakit kronis, dan tingkat produktivitas. Desa-desa yang tidak memiliki akses terhadap bantuan sosial diwajibkan untuk mengajukan proposal, sehingga menambah dimensi berbasis komunitas dalam pemilihan kandidat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program dengan mengarahkan sumber daya kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan memastikan keseimbangan antara pemberdayaan daerah dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah pusat.

3) Penerima Jaminan Bantuan Kartu Sosial Jawa Tengah Sejahtera

Setelah kandidat diidentifikasi dan diverifikasi, program bergerak untuk memberikan bantuan jaminan kartu sosial kepada penerima terpilih. Penerima manfaat adalah mereka yang berhasil

memenuhi kriteria kelayakan dan dianggap membutuhkan bantuan berdasarkan proses verifikasi dan pengusulan. Komitmen program terhadap keakuratan dan keadilan tercermin dalam proses validasi yang ketat, yang menunjukkan dedikasinya untuk memastikan bahwa bantuan menjangkau individu yang menghadapi beragam kondisi, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus atau penyakit kronis.

#### 4) Penyaluran Kartu Jawa Tengah Sejahtera

Tahap terakhir adalah pendistribusian Kartu Jateng Sejahtera kepada penerima yang sudah dipastikan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa penerima manfaat yang teridentifikasi menerima bantuan sosial yang dimaksud. Metodologi yang terorganisir dengan baik dan fleksibel yang digunakan dalam pelaksanaannya memastikan bahwa bantuan didistribusikan secara efisien. Komitmen program terhadap transparansi dan akuntabilitas terlihat jelas dalam responsnya terhadap perubahan kebijakan dan dedikasinya terhadap alokasi sumber daya. Ketaatan terhadap kuota yang telah ditentukan dan kriteria kelayakan dalam proses pendistribusian memastikan bantuan sampai kepada pihak yang paling membutuhkan, sehingga turut menyukseskan program Kartu Jateng Sejahtera di Kabupaten Kendal secara keseluruhan.

#### **4.1.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) Di Kecamatan Boja**

Mengenai Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di Kabupaten Boja, dapat dirangkum poin-poin penting sebagai berikut:

##### **4.1.2.1 Faktor Pendukung**

- a) Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKSK) menunjukkan efektivitas dengan pendekatan sistematisnya dalam mengidentifikasi dan memvalidasi calon penerima, memastikan tepat sasaran bantuan sosial.
- b) Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan, seperti Bank Jateng, menyederhanakan proses komunikasi dan dokumentasi, sehingga berkontribusi terhadap keberhasilan program.
- c) Komitmen program dalam memberikan bantuan kepada penerima bantuan berkebutuhan khusus, termasuk Penyandang Disabilitas (ODGJ) dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan mental, terlihat dari kemampuan adaptasinya dalam memberikan dukungan kepada keluarga mereka ketika penyaluran langsung menghadapi kendala praktis.

##### **4.1.2.2 Faktor Penghambat**

- a) Keterlambatan dalam distribusi, terutama ketika penerima manfaat, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, harus mengunjungi bank secara langsung, merupakan hambatan yang signifikan, menyebabkan frustrasi dan menghambat pelaporan tepat waktu.

- b) Penekanan program pada pemberian bantuan tunai kepada individu yang kurang produktif menimbulkan kekhawatiran tentang inklusivitas dan potensi keterbatasan dalam mendorong pemberdayaan dan pengembangan keterampilan.
- c) Kekurangan personel departemen layanan sosial, ditambah dengan kekhawatiran mengenai ketersediaan ruang kantor yang memadai, dapat mengurangi kapasitas departemen untuk menangani beban kerja dan menjalankan program secara efektif.

## **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah dapat menciptakan sistem distribusi alternatif yang lebih efisien dan inklusif dapat mengatasi keterlambatan, terutama bagi penerima manfaat yang kesulitan mengunjungi bank secara langsung. Pilihan seperti layanan pengiriman atau loket distribusi di tingkat lokal dapat meminimalkan hambatan fisik dan memberikan kemudahan akses bagi semua penerima manfaat, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus.
2. Pemerintah dapat mengembangkan platform pelaporan online dan mobile dapat meningkatkan ketepatan waktu pelaporan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, penerima manfaat, termasuk mereka yang kesulitan bergerak, dapat melaporkan kondisi mereka tanpa harus mengunjungi bank secara langsung. Hal

akan mengurangi frustrasi dan mempercepat proses distribusi, menciptakan sistem yang lebih responsif dan inklusif.

3. Untuk mengatasi keterbatasan dalam pendekatan bantuan, pertimbangkan untuk meningkatkan inklusivitas program KJTS dengan memasukkan langkah-langkah yang mendorong pemberdayaan dan pengembangan keterampilan di antara penerima manfaat. Melaksanakan program atau inisiatif pelatihan yang ditargetkan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas penerimanya, selaras dengan tujuan kemajuan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Hal ini dapat melibatkan kolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan, pusat pelatihan kejuruan, atau dunia usaha lokal untuk memberikan peluang pengembangan keterampilan dan lapangan kerja, sehingga mengatasi potensi hambatan dalam memfokuskan hanya pada bantuan tunai bagi individu yang kurang produktif.